



KOMISI KEBENARAN DAN
REKONSILIASI (KKR) ACEH

TRUTH TELLING REPORT 2

2021

Truth Telling Report-2

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

Daftar Isi

Sambutan Ketua KKR Aceh		iii
Bagian I	Peristiwa Pembunuhan tanpa Proses Hukum Pada Periode Konflik Bersenjata di Aceh	1
	1.1. Pengantar	1
	1.2. Metode	3
	1.3. Telaah Peristiwa	4
	Nyak Kaoy binti Hasan	4
	Nurlaili binti Ibrahim	5
	Nuriah binti Ibrahim	5
	Asiah binti Hasan	6
	1.4. Profil dan Karakteristik Korban	7
Bagian II	Temuan Penghilangan Paksa Masa DOM	9
Bagian III	Kekerasan Seksual yang terjadi pada Masa Konflik Aceh	22
Bagian IV	Cerita dari Lapangan	27

SAMBUTAN KETUA KKR ACEH

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pengungkapan Kebenaran-2 (*Truth Telling Report-2*) KKR Aceh Tahun 2021. Dokumen ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pencarian Fakta untuk untuk pelaksanaan mandat KKR Aceh yakni, Pengungkapan Kebenaran Dugaan Peristiwa Pelanggaran HAM Masa Lalu semasa Konflik Aceh.

Dokumen laporan ini merupakan seri kedua dari cerita pengungkapan kebenaran KKR Aceh. Di mana edisi pertama sudah diterbitkan pada tahun 2020. Dalam menyelesaikan dokumen ini, pihak KKR Aceh sangat berterima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyusunan dokumen ini.

Kami berharap semoga dengan adanya dokumen Laporan Pengungkapan Kebenaran-2 ini, dapat memberikan pengetahuan yang lebih lengkap bagi para pihak dan dukungan yang lebih maksimal untuk keberadaan dan kinerja KKR Aceh.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan dokumen ini.

Banda Aceh, 8 September 2020

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Afridal Darmi, SH, LLM

Ketua

Bagian I

PERISTIWA PEMBUNUHAN TANPA PROSES HUKUM PADA PERIODE KONFLIK BERSENJATA DI ACEH

1.1. PENGANTAR

Berdasarkan kesaksian para korban pelanggaran HAM Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menemukan telah terjadi peristiwa-peristiwa pembunuhan tanpa proses hukum sepanjang konflik bersenjata berlangsung. Baik terhadap penduduk sipil yang dicurigai berafiliasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maupun mereka yang tidak punya afiliasi politik. Ada dugaan bahwa praktik *unlawful killing* (pembunuhan diluar hukum) terjadi konsisten di tempat-tempat tertentu dalam rentang waktu lima belas tahun sejak operasi militer pertama dilancarkan. Yakni sejak pemberlakuan Daerah Operasi Militer (Juli 1989-Agustus 1998) di bawah Pemerintahan Orde Baru, serta terus berlanjut ketika Indonesia sedang menuju transisi politik yang lebih demokratis melalui reformasi 1998. Data KKR Aceh menunjukkan bahwa angka pembunuhan terbanyak terjadi selama periode Darurat Militer (2003-2004).

Tempat-tempat berlangsungnya pembunuhan tanpa proses hukum, yang diduga dimotivasi oleh satu misi taktis tertentu, dikenali setidaknya oleh dua kondisi utama. Berdasarkan topografi merupakan basis ideal bagi kelompok GAM dalam mempertahankan dan melindungi kegiatan mereka dari operasi militer.

Pengertian tentang tempat di atas hanya bisa disimpulkan dengan melihat tempat dari sudut pandang operasi militer itu sendiri, yakni berdasarkan tujuannya. Misi taktis selalu berhubungan dengan tujuan, sedangkan tujuan berkaitan dengan hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu operasi militer. Namun, tujuan itu sejak awal adalah rahasia. Pejabat pemerintah Indonesia berwenang, baik militer maupun sipil, di tingkat provinsi ataupun pusat, tidak pernah secara resmi menyatakan tujuan operasi-

operasi militer dilakukan, kecuali menyebutnya sebagai upaya memulihkan situasi keamanan di Aceh.¹

Tentu saja mengetahui tujuan ini tidak harus tergantung pada pengakuan pemerintah atau institusi yang bertanggungjawab. Sebaliknya teka-teki ini dapat dipahami dengan melihat pada keadaan ketika dan setelah operasi militer itu berlangsung. Apa yang telah ditinggalkan? Jika itu adalah kerusakan dan dampak, kerusakan dan dampak seperti apa yang telah ditinggalkan. Alternatif untuk itu adalah dengan mempertimbangkan keterangan para saksi; melihat hubungan apa yang menyebabkan seseorang menjadi korban selama operasi militer berlangsung. Walaupun tidak semua, berdasarkan kesaksian para korban, sebagian tujuan itu dapat dikenali. Termasuk, jika dalam sebuah operasi militer tersembunyi niat untuk memusnahkan bukti dan merusak tempat kejadian.

Dalam tulisan *Penghilangan Paksa Masa DOM yang Dilakukan Militer Indonesia*, tampak hubungan yang sangat jelas bahwa mereka yang dihilangkan paksa oleh pihak yang diduga berasal dari kesatuan Kopassus selama DOM adalah mereka yang dianggap mengetahui keberadaan atau tempat persembunyian anggota GAM yang memiliki posisi penting².

Sebelum dinyatakan hilang, mereka diculik, dan disiksa selama beberapa minggu di pos-pos yang diduga adalah pos di bawah kendali pihak militer. Dalam hampir semua kasus ini terdapat serangan yang mirip satu sama lain, walau pun dilakukan pada waktu dan tempat berbeda. Seperti halnya penghilangan paksa dan penyiksaan, KKR Aceh menilai bahwa *unlawful killing* adalah salah satu taktik yang digunakan militer Indonesia dalam operasi militer di Aceh.

Taktik ini sekilas terlihat sebagai upaya untuk menciptakan teror dan ketakutan di kalangan penduduk. Penilaian ini sebagian benar. Teror membuat penduduk ketakutan. Anak-anak keluarga GPK yang terpisah dari orangtuanya ditolak oleh

¹ Sebagai perbandingan, Komnas HAM dalam salah satu laporannya menyimpulkan bahwa tugas Operasi Jaring Merah berdasarkan tiga hal. Pertama, mencari dan menghancurkan tokoh dan anggota GPK-AM. Kedua, menghancurkan jaringan clandestine GPK – AM di kota dan kampung. Ketiga, membongkar jaringan sindikat ganja sebagai sumber dana GPK – AM.

² Mengacu kepada pernyataan seorang saksi, bahwa ayahnya dihabisi karena diduga menyembunyikan seorang anggota GAM penting, Pawang Rasyid.

kerabat terdekat mereka, memindahkan paksa anak-anak GPK yang orangtua mereka telah dibunuh ke suatu lokasi tertentu. Mereka hidup sendiri, dan lebih dari satu kasus menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk menghidupi orangtua mereka yang sedang berada di persembunyian.

Temuan umum di atas merujuk pada informasi dan/atau pernyataan dari korban dan keluarganya atas peristiwa yang terjadi di Tiro, sebuah kawasan di kabupaten Pidie yang merupakan wilayah dari operasi selama konflik berlangsung.

1.2. METODE

Selama konflik di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menemukan telah terjadi 1007 pembunuhan dan kematian yang dilakukan oleh militer Indonesia; GAM; dan kelompok milisi bersenjata yang patut diduga didukung oleh ABRI. Pembunuhan dan kematian terjadi merata di 14 kabupaten/kota wilayah kerja KKR Aceh. Jumlah peristiwa paling banyak berturut-turut di Aceh Besar (182 kasus); Pidie (146 kasus); Bener Meriah (115 kasus); Pidie Jaya (105 kasus); Aceh Utara (105 kasus). Angka ini harus digunakan secara hati-hati karena tidak merepresentasikan jumlah peristiwa.

KKR Aceh mendapatkan data melalui Pengambilan Pernyataan, suatu proses untuk mendengar kesaksian korban pelanggaran HAM berat selama konflik Aceh. Antara tahun 2018-2019 KKR Aceh mengerahkan sekitar 100 petugas untuk mengambil pernyataan di 17 kabupaten/ kota daerah kerja, dan mengumpulkan sekitar 5.000 pernyataan.

Data yang digunakan untuk bagian ini bersumber dari pangkalan data KKR Aceh, berada dalam kategori *Pembunuhan dan Kematian*. Berdasarkan data di atas, tulisan ini akan menjelaskan situasi yang dialami oleh korban pada periode konflik bersenjata dan terbatas terhadap tindakan pembunuhan yang terjadi di Tiro, Pidie, antara 1989-2003. Alasan lokasi di atas dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

(1) angka pembunuhan dan kematian di Pidie cenderung tinggi dibandingkan tempat lain, dan (2) Menjadi salah satu tempat dilangsungkannya operasi

1.3. TELAAH PERISTIWA

Tidak lama setelah DOM diberlakukan, ABRI mengepung Tiro, salah satu basis penting GAM. Pengepungan itu bertujuan menangkap anggota GAM, terutama yang baru kembali dari pelatihan militer di Libya. ABRI menyebut mereka sebagai “target nomor satu.” Pengepungan memaksa anggota GAM mundur dan bertahan di gunung-gunung terdekat. Pembunuhan-pembunuhan tanpa proses hukum terjadi selama masa pengepungan dan perburuan tersebut. Keterangan para saksi berikut ini menjelaskan bahwa pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Tiro dilakukan untuk satu tujuan tertentu.

Nyak Kaoy Binti Hasan

Seorang saksi perempuan yang ayahnya seorang GPK mengatakan, bahwa selama pengepungan Tiro, setiap hari pihak yang diduga anggota Koppasus datang mencari ayahnya ke rumah. Mereka berpakaian loreng, bersenjata lengkap, dan menggunakan baret.

Tentara tidak segan-segan mengatakan kepada saksi bahwa mereka akan membunuh ayahnya, termasuk siapa pun yang melindunginya. Hampir setiap saksi mengalami penyiksaan karena “Saya tidak tahu Abi berada di mana dan saya menjawab apa adanya.” Setelah itu, Koppasus bertindak lebih jauh.

Pada hari ketiga setelah Lebaran Idul Fitri, pelaku menangkap paksa adik saksi dan membunuhnya beberapa jam kemudian. Beberapa jam setelah dibunuh, sekitar pukul sembilan malam, pihak yang diduga anggota Koppasus mengantar mayat adik saksi ke rumah. Pada saat inilah pihak tersebut menangkap saksi dan membawanya ke suatu tempat yang tidak dikenali oleh saksi. Pada jam yang sama ketika saksi ditangkap, mereka juga menangkap adik perempuan saksi dan suaminya di rumah yang berbeda. Beberapa jam setelah ditangkap, sekitar pukul enam pagi, mereka membawa kembali saksi ke kampung dan dikumpulkan bersama penduduk yang sudah terlebih dahulu dibariskan di sebuah tempat terbuka, di halaman sebuah kedai. Tidak lama kemudian, saksi mendengar suara tembakan dari arah selatan kedai, dekat rumpun bambu. “Orang yang mengambil saya telah menembak ibu saya,” kata saksi. Empat hari

setelah adik laki-laki dan ibunya dibunuh, mereka kembali datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa mereka menemukan jenazah orang kampung di atas gunung. Jenazah yang dimaksud adalah jasad adik perempuan saksi yang diculik empat hari lalu, pada jam yang sama pada saat saksi ditangkap dan kemungkinan telah dibawa ke tempat berbeda sebelum dibunuh.

Nurlaili Binti Ibrahim

Seorang saksi perempuan mengatakan, bahwa pada 1990 pihak yang diduga dari kesatuan Brimob menculik dan membunuh ayahnya pada saat sedang menguburkan seorang penduduk yang mati tertembak. Pelaku yang menculik ayah saksi datang ke pemakaman dengan senjata lengkap. Korban dimasukkan ke dalam mobil. Saksi dan ibunya mengikuti dari belakang. Mobil penculik menuju ke sebuah pos yang diduga sebagai pos militer di Tiro. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara tembakan, sekitar pukul 12. Korban dieksekusi di dalam mobil. "Ayah ditembak di kepala," kata saksi, "Sampai sebagian cairan otak ada terdapat di mobil. Ibu saya dalam keadaan pingsan."

Ayah saksi adalah seorang teungku dan mempunyai sebuah dayah. Menurut saksi, ayahnya sering menjamu orang-orang di dayah, termasuk gerilyawan. Saksi mengatakan, pelaku membunuh ayahnya karena alasan tersebut.

Nuriah binti Ibrahim

Pada hari dan jam yang sama dengan pembunuhan kilat di atas, seorang saksi perempuan mengatakan bahwa sekitar 10 orang yang diduga tentara juga menculik ayahnya ketika menghadiri pemakaman seorang penduduk yang mati tertembak. Mereka menggiring korban dari pemakaman, memasukkannya ke dalam sebuah mobil, lalu membawa ke suatu tempat tidak diketahui. Keesokan harinya, sekitar pukul 4 pagi, saksi mengatakan dia mendengar bahwa ayahnya sudah dibunuh. Ibu saksi menjemput jenazah dengan sebuah mobil pinjaman. Kondisi jasad yang rusak menjelaskan apa yang terjadi dengan korban saat dibunuh.

“Beliau ditembak beberapa kali. Di mulut dan telinganya selalu mengeluarkan darah. Sedang kondisi matanya sangat memprihatinkan. Bahkan setelah dikafani dengan berlapis pun darahnya tetap terus membasahi kain kafan.”

Pada saat korban akan dimakamkan, sekitar sepuluh orang yang diduga tentara datang ke rumah saksi dan mengancam penduduk agar tidak menguburkan korban malam itu. Mereka memaksa menunda hingga keesokan harinya.

Setelah pembunuhan ayahnya, saksi mengatakan bahwa ibunya sering dijemput paksa oleh Koramil. Mereka datang beberapa hari sekali. “Kadang dijemput pada pukul empat pagi, dan baru dibawa pulang keesokan harinya.”

Asiah binti Hasan

Pada 1990, seorang saksi perempuan menceritakan, bahwa ibu dan suaminya dibunuh oleh pihak yang diduga anggota Kopassus pada saat yang bersamaan. Saksi tidak mengetahui mengapa suaminya dibunuh. Suaminya diculik di pos ronda beberapa saat sebelum subuh. Lalu dibawa ke rumah. Saksi yang saat itu sedang hamil enam bulan diminta untuk mengenali suaminya. Karena gelap saksi tidak dapat melihat berapa jumlah pelaku.

Setelah itu, pelaku menggiring korban ke beberapa tempat, termasuk ke Ie Leube. Kemudian korban dibawa lagi ke rumah. Di sinilah, menurut saksi, pelaku berusaha memperkosanya. Tapi saksi melawan dan berhasil membebaskan diri.

Pada jam inilah, mereka menculik ibu saksi. Suami dan ibu saksi dibawa dengan mobil menuju sebuah kedai di desa. Mereka memaksa saksi ikut, “Untuk melihat terakhir kali,” kata saksi menirukan ucapan mereka. Tiba di kedai fajar sudah mulai terbit, sehingga saksi dapat melihat semuanya dengan jelas. “Ibu dan suami saya diikat bersama-sama,” kata saksi. Mereka juga memaksa penduduk untuk menyaksikan eksekusi. Namun saksi tidak dapat mengingat lagi siapa saja yang hadir. “Ingatan saya kabur,” kata saksi. Menjelang eksekusi, mereka memaksa saksi berdiri di depan ayah dan ibunya. “Jadi saya melihat dengan jelas,” kata saksi, “Sewaktu dada suami saya diterjang peluru, tembus hingga ke punggung. Saya juga melihat betapa saat terjatuh meregang nyawa, urine suami saya terhambur membasahi celananya.”

Setelah ibu dan suami saksi dieksekusi, kedai tempat eksekusi berlangsung dibakar habis. Seminggu setelah eksekusi, pelaku memaksa penduduk membakar rumah saksi dan membongkar apa yang tersisa. Apabila ada penduduk yang menolak, mereka akan menghajar mereka. Saksi mengatakan, setelah ibu dan suaminya dieksekusi, rumah dan harta bendanya dimusnahkan, mereka kembali datang untuk mencari bapaknya.

1.4. PROFIL DAN KARAKTERISTIK KORBAN

Profil korban yang dibunuh sebagai berikut:

1. Korban berusia lanjut; keluarga inti kelompok perlawanan, termasuk perempuan, dan lebih dari satu orang saksi mengakui bahwa korban yang dibunuh tidak ada hubungan dengan GAM; beberapa saksi korban tidak bisa baca tulis
2. Saksi-saksi korban yang dibunuh dianggap tidak akan melaporkan serangan tersebut atau tidak akan punya akses pada sistem peradilan;
3. Sementara terhadap anggota gerilyawan yang dibunuh, pelaku menganggap bahwa keluarga mereka akan menerima pembunuhan tersebut sebagai suatu hukuman, bagian dari satu aturan main karena kegiatan mereka dalam kelompok perlawanan;
4. Pembunuhan pemimpin kelompok, seperti keuchik dan teungku, yang dianggap membangun aliansi dengan kelompok perlawanan adalah upaya untuk menyingkirkan saksi.

Adapun karakteristik serangan sebagai berikut:

1. Lokasi pembunuhan sengaja dipilih di tempat-tempat umum, seperti pasar, kedai, tanah lapang, dan masjid. Ke tempat-tempat itulah pelaku kemudian menggiring penduduk untuk melihat eksekusi berlangsung. Dua saksi berbeda yang anggota keluarganya dibunuh menyatakan, mereka dipaksa untuk menonton eksekusi anggota keluarga mereka; pemusnahan dan pembakaran terhadap tempat eksekusi adalah upaya untuk merusak tempat kejadian
2. Tiga pembunuhan berbeda terjadi terjadi di batas antara kampung dan hutan. Setelah membunuh, pelaku menjaga jasad korban selama sehari-hari serta

melarang penduduk untuk mengambil jasad korban. Penduduk baruizinkan menguburkan jenazah kedua korban setelah jasad mereka busuk dan rusak.

3. Dalam setiap kali pembunuhan, pelaku membakar dan menghancurkan rumah penduduk serta menjarah harta benda mereka.
4. Anggota keluarga korban pembunuhan, umumnya mengalami penyiksaan, penyanderaan, dan serangan seksual, beberapa saat setelah ataupun sebelum eksekusi berlangsung. Serangan terhadap anggota keluarga terus berlanjut beberapa waktu setelah pembunuhan.

Profil korban dan saksi korban; alasan/penentuan pembunuhan, tempat pembunuhan; bentuk serangan; serangan susulan terhadap keluarga korban, memberikan satu gambaran yang jelas terhadap pola serangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, karakteristik serangan ini diperkirakan untuk memancing GAM besar keluar dari persembunyian. Dengan mempelajari kasus-kasus lain, di tempat dan waktu berbeda, ada banyak sekali pertanyaan yang bisa diajukan. Apakah di tempat-tempat lain pola ini berulang? Apakah di balik pola ini ditemukan satu alasan yang identik sebagaimana yang terjadi di Tiro?

Mengacu pada data KKR Aceh, kematian dan pembunuhan di Aceh Besar adalah yang tertinggi. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam periode setelah Jenderal Wiranto secara resmi mencabut status DOM pada Agustus 1998. Sebagian besar kematian dan pembunuhan di Kabupaten itu berlangsung di bawah periode Darurat Militer. Berbeda dengan di Tiro, pembunuhan-pembunuhan di Aceh Besar adalah sesuatu yang baru. Penduduk Aceh Besar yang selama periode DOM relatif bebas dari pengaruh ideologi Aceh Merdeka, sejak GAM menyusun ulang kekuatannya pada 1998 telah berkembang menjadi satu basis baru dengan memanfaatkan dukungan penduduk dan keuntungan topografi untuk melakukan kegiatan gerilya dan penyebaran ideologi. Apakah eksekusi-eksekusi kilat yang dilakukan militer selama DM di kabupaten itu memperlihatkan kesamaan tujuan dengan apa yang terjadi di Tiro? Karena hanya dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa serangan ini mempunyai sifat terorganisir dan meluas pada saat yang sama. Mengenali pola ini sekaligus akan membantu melihat kesinambungan antara penggunaan taktik, dalam hal ini pembunuhan-pembunuhan tanpa proses hukum, selama DOM dan beberapa tahun kemudian ketika Darurat Militer/ Sipil diberlakukan.

Bagian II

TEMUAN PENGHILANGAN PAKSA MASA DOM

(1)

SELAMA masa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh Komisi menemukan sejumlah peristiwa penghilangan paksa terhadap penduduk sipil, serta anggota dan simpatisan Gerakan Aceh Merdeka. Untuk keperluan tulisan ini, KKR Aceh akan menjelaskan sepuluh peristiwa penghilangan paksa dan penyiksaan yang terjadi antara tahun 1977-1998 dengan mengandalkan data yang dikumpulkan KKR Aceh melalui pengambilan pernyataan sepanjang tahun 2019.

Selama proses pengambilan pernyataan, KKR Aceh mewawancarai keluarga korban penghilangan paksa selama pemberlakuan DOM. Sebagian besar saksi melihat langsung bagaimana anggota keluarga mereka diambil paksa, digiring menuju pos-pos militer sebagai tawanan, disiksa selama ditawan, setelah itu lenyap dari pos-pos militer tempat mereka terakhir ditawan. Urutan ini menunjukkan satu alur yang jelas bagaimana keluarga mereka hilang tanpa jejak.

Karena pada umumnya korban penghilangan paksa ditawan di pos-pos militer yang dikendalikan oleh Kopassus, sebagian besar pemberi kesaksian pada KKR Aceh mendapatkan informasi tentang anggota keluarga mereka yang diculik berdasarkan kesaksian tawanan yang sudah dibebaskan. Umumnya, keterangan yang berasal dari para bekas tawanan tersebut adalah keterangan terakhir tentang keberadaan anggota keluarga mereka.

Selama masa pemberlakuan DOM di Aceh, Komisi menemukan beberapa kasus yang patut diduga sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat, namun khusus kasus penghilangan paksa selama periode ini, terdapat satu kecenderungan utama yang ditemukan KKR Aceh yaitu dalam semua kasus penghilangan paksa selalu diawali atau dilanjutkan oleh penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan; penyanderaan anggota keluarga untuk membuat target utama menyerah; pembakaran dan perusakan terhadap harta benda; dan manipulasi untuk membuat anggota keluarga lain atau korban menjadi lemah dan menyerah, yang ke semua pelanggaran ini tidak mungkin ditulis secara terpisah dengan kasus penghilangan paksa.

Kasus penghilangan paksa ini terjadi dalam ruang dan waktu tertentu, selama masa pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh. DOM mengacu pada istilah yang digunakan militer Indonesia pada masa Orde Baru, untuk mengantisipasi gangguan keamanan dalam wilayah Indonesia. Dalam hal ini dilatarbelakangi oleh kegiatan kelompok separatis Aceh Merdeka (AM). Orde Baru menamainya Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK).

DOM di Aceh berlaku dari tahun 1989-1998 dengan sandi Operasi Jaring Merah. Dalam operasi ini, konsentrasi militer terbesar dikerahkan di tiga kabupaten, yaitu Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Lebih daripada apa yang diakui secara resmi oleh negara tentang tahun dan status operasi militer ini, KKR Aceh menemukan bahwa peristiwa-peristiwa penghilangan paksa yang menjadi bagian dari operasi militer telah berlangsung sejak tahun 1977.

Tujuan akhir DOM di Aceh adalah untuk menghancurkan kelompok perlawanan Aceh Merdeka. Termasuk dalam hal ini menghancurkan ideologi di kalangan pengikut dan simpatisan gerakan tersebut. Untuk mencapai hasil ini Negara bukan hanya mengerahkan militernya, tapi, sebagaimana yang akan kita lihat nanti, melakukan penghilangan paksa terhadap penduduk yang dituduh terlibat dalam atau pendukung kelompok perlawanan. Dilihat dari segi waktu, DOM adalah operasi militer jangka panjang, yang menjangkau satu hingga dua generasi para pengikut dan simpatisan Aceh Merdeka.

Berdasarkan data yang dikumpulkan KKR Aceh, sifat operasi militer ini adalah gabungan antara operasi intelijen dan operasi tempur. Peristiwa-peristiwa penghilangan paksa selama periode ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban adalah mereka yang sebelumnya ditangkap, ditawan, dan disiksa untuk kepentingan mendapatkan informasi atau pengakuan tertentu. Sebagian besar mereka yang dinyatakan hilang adalah para tawanan yang disekap di pos-pos militer. Sejauh informasi yang didapat dari tawanan belum memadai ataupun tawanan dianggap masih berguna maka tawanan hanya akan disiksa. Lama masa tawanan berkisar antara sepuluh hari sampai satu bulan, kemudian dibebaskan. Pengertian dibebaskan di sini adalah tawanan diizinkan pulang ke rumah, tapi sewaktu-waktu si bekas tawanan bisa kembali ditangkap. Lebih dari satu kasus menunjukkan bahwa seorang korban

penghilangan paksa telah ditangkap, ditawan, dan disiksa pada tahun-tahun sebelum yang bersangkutan menjadi korban penghilangan paksa.

Di samping itu, berdasarkan kesaksian dalam peristiwa-peristiwa penghilangan paksa selama kurang lebih 30 tahun pemberlakuan DOM di Aceh, ada satu petunjuk penting. Yaitu bahwa operasi militer di Aceh berlangsung secara tertutup dan rahasia, di mana salah satu cirinya yang paling menonjol adalah penempatan pasukan para komando. Pasukan ditempatkan dalam jumlah yang efisien pada posisi tertentu, terpisah dari markas teritorial militer organik, walau pun untuk beberapa tujuan saling berhubungan.

Dalam laporan ini, akan dipaparkan bagaimana peristiwa-peristiwa penghilangan paksa selama masa DOM dijalankan di lapangan. Pemaparan ini setidaknya berdasarkan tiga hal. *Pertama*, menyangkut siapa pelaku. *Kedua*, bagaimana pelaku bertindak. Dan, *ketiga*, bagaimana pelaku memilih dan menentukan sasaran.

(2)

DATA yang dihimpun KKR Aceh merujuk pada informasi dan pernyataan saksi korban serta beberapa sumber lainnya menunjukkan bahwa Kopassus (Komando Pasukan Khusus) pasukan para komando di bawah Angkatan Darat – mengambil peran terbesar dalam kasus-kasus penghilangan paksa yang terjadi selama DOM. KKR Aceh menemukan bahwa peristiwa Penghilangan Paksa terjadi antara Maret-Agustus 1990. Misalnya:

1. Pelaku mengambil seorang perempuan, pendukung Aceh Merdeka berusia 53, di rumahnya di Pidie. Berdasarkan laporan ini, diketahui Kopassus mengambil empat orang lain di berbagai tempat berbeda di Pidie. Perempuan ini dinyatakan hilang oleh keluarganya setelah sebulan ditawan di Pos Sattis Rancong.
2. Seratusan tentara mengambil paksa seorang laki-laki di kecamatan Seunudon, Aceh Utara, yang diduga simpatisan Aceh Merdeka. Sebelum keluarga menyatakannya hilang, dia ditawan di Pos Sattis Rancong.
3. Pelaku menyandera seorang perempuan di Koramil Tangse selama sebulan dan menyiksanya. Suaminya yang menjadi buron kemudian menyerahkan diri ke Koramil Tangse. Perempuan ini kemudian dibebaskan, tapi suaminya dinyatakan hilang setelah menyerahkan diri.

4. Pada 22 Juli 1990, sekitar 30 orang yang diduga tentara yang mengenakan baret merah mengambil tiga orang laki-laki (ayah, anak, dan sepupu), di Nisam, Aceh Utara. Sejak saat itu ketiganya dinyatakan hilang.
5. Menjelang 17 Agustus 1990, 12 tentara dari Satgas 100 Lamlo, dengan komandan Abu Bakar, menjemput paksa seorang laki-laki di Pantaraja, Pidie. Sejak saat itu korban dinyatakan hilang. Korban tidak ada hubungan dengan Aceh Merdeka, namun aktif sebagai kader PPP. Menantu korban, M Yusuf, setelah mengetahui ayah mertuanya dijadikan tawanan, kemudian mendatangi Pos Sattis Lamlo. Pos ini ada di bawah kendali Kopassus. Sejak mendatangi Pos Sattis Lamlo, M Yusuf juga tidak pernah kembali lagi.
6. Pada 4 Agustus 1990, pelaku menangkap empat belas laki-laki dari Ulee Glee, Pidie. KKR Aceh menerima satu laporan penghilangan paksa dalam rangkaian pengambilan tanpa prosedur atas nama Jalaluddin bin Yusuf, kelahiran 1965.
7. Pada Kamis, 26 Juli 1990, pihak yang diduga tentara menangkap seorang laki-laki di tengah jalan pada saat menuju pasar untuk membeli ikan di Aceh Tengah. Sejak penangkapan itu dia dinyatakan hilang. Kepada KKR Aceh istrinya mengatakan, setelah ditangkap kemungkinan korban dibawa ke Kodim Lampahan. Korban dituduh menyimpan senjata. Setelah penangkapan beberapa kali tentara menggeledah rumah korban.
8. Tiga orang yang diduga anggota Kopassus dengan mengendarai mobil jip Taft Rocky menangkap seorang laki-laki di Mutiara, Pidie. Korban dituduh sebagai pendukung Aceh Merdeka dan dibawa ke Rumah Geudong. Sejak saat itu keluarga tidak melihat lagi korban.
9. Pihak yang diduga anggota Tentara mengumpulkan penduduk di meunasah kampung Coh, Pidie, pada sebuah subuh. mereka mengambil salah seorang laki-laki dalam kumpulan tersebut, lalu menawannya di Koramil Trienggadeng selama lima malam. Setelah itu keluarga menyatakan dia hilang
10. Pihak yang diduga anggota Tentara mengambil seorang laki-laki pada saat penduduk dibariskan untuk diberi pengarahan di meunasah kampung Tamphui, Pidie. Laki-laki itu dinaikkan ke dalam truk dan dibawa Koramil Trienggadeng. Sejak saat itu dia dinyatakan hilang. Laki-laki itu berusia 22 tahun dan tidak terlibat dalam organisasi perlawanan. Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Komisi, alasan pengambilan tanpa prosedur tersebut karena korban

datang terlambat pada saat pengarahan dan berkacak pinggang. “Kebiasannya memang begitu,” kata keluarga. “Bukan karena dia preman atau sombong.”

11. Diperkirakan antara Agustus-September 1990 tentara dari Koramil Trienggadeng mengambil paksa enam orang laki-laki di kampung Teumamah, Pidie. Mereka dinaikkan ke dalam truk. Komisi menerima dua laporan penghilangan paksa dalam kejadian tersebut, ayah dan anak yang ditangkap di dua tempat terpisah, tapi pada hari yang sama. Setelah diambil paksa keduanya tidak pernah kembali lagi. Keluarga memperkirakan keduanya telah dibunuh di suatu tempat di Panton Labu, Aceh Utara, setelah selama berbulan-bulan ditawan di beberapa pos militer.

Pada 1992 Komisi menerima satu laporan kasus penghilangan paksa. Seorang anggota gerakan perlawanan dinyatakan hilang setelah terakhir diketahui dituduh pada sebuah razia di sekitar Timang Gajah, Aceh Tengah. Kasus terakhir yang dicatat Komisi tentang keterlibatan pihak yang diduga Kopassus dalam kasus penghilangan paksa terjadi pada Maret 1998, beberapa bulan menjelang kejatuhan rezim Orde Baru atau setahun sebelum pemerintah hasil reformasi mencabut DOM di Aceh. Pada bulan itu, pihak yang diduga Kopassus yang bermarkas di Pos Sattis Rumoh Geudong, Pidie, menjemput seorang laki-laki asal Pidie yang sedang berada di Aceh Utara, lalu membawanya ke markas mereka. Menurut pengakuan istri korban kepada KKR Aceh, korban ditawan selama sebulan di Pos Sattis Rumoh Geudong, lalu lenyap hingga sekarang.

Urutan waktu di atas memberi petunjuk bahwa pihak yang diduga Kopassus mengendalikan operasi ini sejak 1990-1998. Masih banyak korban-korban penghilangan paksa selama DOM yang dilakukan oleh militer Indonesia. Terutama dalam tahun 1990, yang mana pada tahun tersebut terjadinya peningkatan penangkapan tanpa prosedur terhadap lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.

Kasus-kasus paling awal memperlihatkan bahwa dalam operasi ini pihak yang diduga Kopassus dibantu sepenuhnya oleh militer organik. Penangkapan-penangkapan tanpa prosedur yang menjadi titik awal seseorang dinyatakan raib selalu melibatkan puluhan, jika bukan ratusan tentara. Tampak juga di sini, beberapa tawanan masih ditempatkan di markas Koramil. Kemungkinan penempatan ini dilakukan untuk

menyaring tawanan. Dalam kasus-kasus penghilangan paksa 1990-an, para saksi hampir tidak pernah mengatakan dari titik mana pelaku datang, tapi mereka menceritakan ke mana pelaku membawa korban, yakni ke pos-pos militer. Pengecualian ditemukan pada kasus penghilangan paksa 1998, dengan jelas seorang saksimata menyebutkan dari mana pelaku datang, sebagaimana yang dicatat Komisi dalam pernyataan berikut ini:

(Pada) hari Jumat, 4 Maret 1998, tersebut, sekitar jam empat sore sudah datang pihak yang diduga anggota Kopassus dari Rumoh Geudong ke tempat abang Ipar saya dengan tujuan menjemput suami saya untuk d bawa pulang ke Sigli.

(3)

Bagaimana urutan kejadian hingga seseorang dinyatakan hilang tanpa jejak? Titik awalnya dimulai dari dua hal.

Pertama, *penangkapan tanpa prosedur*. Pihak yang diduga anggota Kopassus menangkap korban melalui suatu pengepungan; menyergap pada lokasi tertentu di kampung; menciduk dalam kerumunan pada saat pengarahannya di meunasah. Seorang saksi menceritakan kepada Komisi bagaimana dia melihat mereka menangkap ayahnya di rumah, waktu itu dia masih duduk di bangku sekolah:

(Bapak) saya dijemput dari rumah oleh banyak tentara dengan berjalan kaki dari simpang Matang Lada. Jumlah mereka sekitar seratusan dan mengepung rumah kami.

Seorang saksi lain menyampaikan kepada Komisi bagaimana pelaku menjemput paksa ibunya, seorang tokoh kunci Aceh Merdeka:

(sekitar) Pukul 12 malam setelah ibu mengajar ngaji anak-anak Gampong Amud Mesjid, tiba-tiba tiga mobil yang diduga pihak Satgas Kopassus Lamlo datang ke rumah dan menyuruh ibu turun dari rumah... (Ibu) diminta oleh tentara untuk ikut sebentar saja. Ibu pergi bersama mobil tersebut dengan mengenakan kaos warna merah, kain sarung petak-petak, dan sehelai kain batik panjang penutup (kepala)

Kedua, *ketika seseorang menyerahkan diri di pos-pos militer*. Untuk membuat sasaran menyerah, pihak yang diduga anggota Kopassus menggunakan taktik penyanderaan terhadap anggota keluarga. Kepada Komisi, seorang saksi menceritakan bahwa pelaku menawan dan menyiksanya, untuk memancing suaminya keluar dari persembunyian. Suaminya menerima pesan tersebut. Sebagaimana penuturan saksi kepada Komisi berikut ini:

(Dua) hari setelah saya dibebaskan, suami saya pulang ke kampung. Beliau diminta melapor ke kantor Koramil, saat itu beliau dibebaskan. Satu Jumat kemudian suami saya melapor lagi dan beliau masih dibebaskan, namun ketika melapor untuk ketiga kalinya beliau tidak pulang dan hingga sekarang menghilang.

Setelah dijemput paksa, pihak yang diduga anggota Kopassus membawa korban ke pos-pos militer. Di pos-pos militer mereka diperlakukan sebagai tawanan. Keluarga tidak mengetahui di mana pelaku menempatkan tawanan. Keluarga mencari tawanan dengan mengidentifikasi pos-pos militer yang terdekat dari lokasi penjemputan. Kadang penguasa pos militer memberitahu status tawanan, tapi lebih sering tidak. Pelaku-sering memindahkan tawanan dari satu pos ke pos yang lain.

Ketika hal ini terjadi, seperti yang terungkap dalam kesaksian yang diterima Komisi, maka kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang tawanan semakin sulit. Jejak seorang tawanan biasanya hilang setelah terjadi pemindahan. Seperti yang disampaikan oleh saksi berikut ini. Ia mendapatkan informasi tentang ibunya yang ditangkap di Pidie dari seorang tawanan lain:

(pertama) Malam itu dibawa ke Gunung Blang Mane untuk menunjukkan tempat pertemuan Aceh Merdeka, kemudian dibawa ke Pos Lamlo. Mereka berada di Pos Lamlo selama seminggu. (kemudian) Mereka dibawa keliling Lhoksukon, Aceh Utara, untuk menunjukkan tempat Aceh Merdeka selama beberapa hari. Kemudian dikembalikan lagi ke Pos Lamlo selama seminggu. (kemudian) di bawa ke Pos Rancong Lhokseumawe, Aceh Utara.

Upaya yang dilakukan keluarga untuk mencari jejak korban penghilangan paksa bisa dikatakan mengalami jalan buntu. Militer membatasi akses keluarga untuk bertemu tawanan, sebagaimana yang disampaikan seorang saksi kepada Komisi tentang ayah,

abang, dan sepupunya setelah dijemput paksa oleh pihak yang diduga anggota Kopassus:

Setelah kejadian itu kami mencari Bapak kemana-mana, bahkan Kakek juga ikut mencari tapi tidak tahu jejaknya di mana. Bahkan Nenek melapor ke keuchik kampung. Kabar yang diterima Nenek, Bapak ditahan di sel Rancong dan saat Nenek jenguk ke Rancong Nenek tidak dikasih (diperkenankan bertemu) oleh mereka.

Informasi tentang tawanan bukan hanya tertutup sejak awal, tapi simpang siur, bahkan menyesatkan. Berikut ini pernyataan seorang istri yang suaminya hilang setelah menjadi tawanan yang diduga pasukan Kopassus di Aceh Tengah:

Tiga bulan setelah penangkapan, saya memperoleh informasi bahwa semua orang yang dibawa bersamaan dengan suami saya sudah bebas. Namun suami saya belum juga kembali. Karena saya belum bisa bepergian, maka saya menitipkan baju untuk suami kepada Bibi yang hendak pergi ke Kodim. Sepulangnya Bibi dari Kodim, dia mengembalikan baju tersebut. Dia mengatakan, suami saya sudah dibebaskan. Semua orang yang ditahan sudah dibebaskan, kecuali suami saya yang hingga sekarang tidak kunjung pulang.

Pos-pos militer yang dikendalikan dan diduduki Koppasus selama DOM dalam kosakata militer Indonesia disebut Pos Sattis (Satuan Taktis). Selama DOM Pos Sattis membentuk sebuah koridor di kawasan seluas 18.549 km² dan tersebar di setiap kecamatan di Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Kesatuan Kopassus menduduki sekitar 49 Pos Sattis. Dari pertukaran tawanan menunjukkan bahwa pos sattis ini saling terhubung, membentuk sebuah struktur kompleks.

Berdasarkan pengakuan sebagian besar keluarga korban penghilangan paksa kepada Komisi, ke dalam struktur menyesatkan inilah korban penghilangan paksa digiring sebagai tawanan, sebelum kemudian dinyatakan hilang. Pos Sattis merupakan bagian tak terpisahkan dari operasi intelijen. Di sini informasi tentang pihak lawan dijarah dan diolah. Akurasi setiap informasi ini dipercaya akan membuat militer Indonesia selangkah lebih dekat dengan kelompok perlawanan yang bersembunyi di tengah penduduk; atau pun di basis-basis gerilya yang keadaan bentang alamnya sulit ditembus. Mendapatkan informasi tentang kelompok perlawanan adalah kunci kenapa seseorang ditawan.

Hampir rata-rata Pos Sattis mempunyai ruang tahanan. Menurut sejumlah kesaksian, ruang tahanan di setiap Pos Sattis lebih mirip kamp konsentrasi ketimbang sebuah penjara dalam konsep 'lembaga pemasyarakatan' di Indonesia. Selama ditahan tanpa proses pengadilan, para tawanan disiksa selama sehari-hari. Penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dan informasi tertentu.

Seorang saksi penghilangan paksa menyatakan kepada Komisi, bahwa di melihat beberapa tawanan yang disiksa di Pos Sattis Rancong, Aceh Utara:

(saya) Melihat Saidah istri Teungku Daud Ujong Leubat, seorang anggota Aceh Merdeka, dan Juairiah istri Teungku Abdurrahman Cot Baroh, juga seorang AM, sedang direndam oleh tentara di dalam sungai. Kalau mereka naik ke atas akan dipukul oleh tentara.

Saksi yang waktu itu datang untuk menjenguk ibunya juga ikut disiksa:

(Saya) kemudian menjumpai dan memeluk ibu, dua orang tentara memarah-marahi saya dan ibu tetapi satu orang tentara menarik saya dalam pelukan ibu kemudian tentara memukul punggung saya sebanyak tiga kali dengan kayu waru sebesar senter yang sudah dipatahkan dua.

Tawanan yang melihat anaknya disiksa berusaha mencegah. Namun, dia pun disiksa:

(Ibu) saya menangis dan meminta agar saya jangan dipukul, malah tentara tadi memukul dengan kayu di kepala dan pinggang ibu saya, kemudian ibu saya ditenggelam-timbulkan ke dalam sungai. Ibu juga dibakar dengan rokok pada kedua pergelangan (tangan).

Apa yang membawa pelaku ke rumah-rumah penduduk selama masa DOM di Aceh? Pada tahun 1990-an, jawaban yang diberikan sangat terbatas, seperti yang telah dijelaskan di atas mengarah kepada satu hal: mereka yang dijemput paksa (dan dalam kasus yang dibicarakan ini mereka yang dinyatakan hilang sebagai tawanan) adalah mereka yang dicurigai terlibat, mendukung, berhubungan, atau dianggap mengetahui kegiatan kelompok separatis. Berdasarkan tujuan inilah pelaku memilih dan menentukan sasaran.

Belakangan, jawaban yang dapat diberikan untuk pertanyaan di atas semakin bertambah. Operasi militer mulai menyasar mereka yang memiliki garis keturunan dengan mereka yang sebelumnya terlibat atau mendukung kegiatan kelompok

separatis tapi oleh operasi militer ini telah lama dilumpuhkan. Biasanya yang disasar dari garis keturunan laki-laki. Kita akan kembali lagi nanti ke bagian ini.

Seorang bernama X, berasal dari Pidie, mengatakan kepada Komisi, bahwa militer Indonesia telah tiga kali menawan ibunya dan ditempatkan pada pos sattis berbeda tetapi masih dalam satu kabupaten.

Ibu saksi merupakan seorang tokoh kunci dalam organisasi perlawanan, yang bertugas mengatur tempat pertemuan, ketersediaan logistik, dan dukungan medis. Pertama sekali, pada 1977, pelaku mengambil ibu saksi dan membawanya ke ke Pos Sattis Lamlo, Pidie. Di sana mereka menawan ibu saksi selama sepuluh hari. Selama menjadi tawanan, dia diinterogasi menyangkut dukungan yang diberikan kepada kelompok perlawanan, dan cara mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui penyiksaan brutal.

Pada 1978, korban kembali ditawan, kali ini bersama suaminya. Mereka membawanya ke pos militer Jiem-jiem, Kecamatan Bandar Baru, Pidie. Sedangkan pasangannya ditawan di Pos Sattis berbeda, Pos Danki Cot Tunong, Glumpang Tiga, Pidie. Menurut korban, suaminya tidak terlibat dalam kelompok perlawanan.

Dalam dua waktu penangkapan paksa di atas, Operasi Jaring Merah belum dimulai di Aceh. Ketika dua belas tahun kemudian operasi ini diberlakukan, dia kembali ditangkap. Apa yang diinginkan militer Indonesia dari tawannya itu adalah informasi tentang kelompok perlawanan. Pada malam penangkapan itu truk-truk militer membawa perempuan ini – termasuk sejumlah tawanan lain yang ditangkap di tempat terpisah – ke suatu tempat yang oleh militer Indonesia diduga sebagai tempat pertemuan Aceh Merdeka. Tidak ada informasi, apakah di sana memang ada pertemuan Aceh Merdeka. Namun, berdasarkan keterangan saksi kepada Komisi, pada hari itu juga militer Indonesia membawa semua tawanan ke pos militer. Selama beberapa hari kemudian, tawanan dipindahkan dari satu pos militer ke pos militer yang lain. Perpindahan terjadi dalam waktu kurang lebih satu bulan. Berdasarkan informasi yang didapat saksi dari tawanan lain, di pos militer inilah ibunya hilang.

Ketika dia hilang di Pos Sattis Rancong, menyiratkan bahwa tidak ada lagi informasi yang bisa diperoleh. Dengan kata lain, sebagai tawanan dia sudah tidak lagi berguna. Namun, dia masih meninggalkan sesuatu yang bermanfaat dari sudut pandang operasi

militer ini. Ini adalah alasan kenapa setahun kemudian pihak yang diduga anggota Kopassus kembali melakukan perburuan ke rumahnya. Untuk itu, kita kembali kepada cerita X:

(setelah) ibu saya diambil oleh tentara, saya beserta 4 orang adik saya dicari oleh (tentara)

Perburuan itu membuat X dan adik-adiknya melarikan diri dan bersembunyi di Gunung Blang Ngom selama beberapa waktu. Dalam persembunyian mereka menderita sakit dan kelaparan. Seperti yang disampaikan saksi kepada Komisi, alasan perburuan mereka:

...Karena kami masih anak dari seorang komando Aceh Merdeka.

Tidak menemukan mangsanya, Kopassus memaksa warga kampung membakar dan menghancurkan rumah X. Dalam fase pelarian tersebut, X menyelamatkan adiknya ke sebuah pesantren dan seorang yang lain ke Meulaboh. Setelah lima belas hari bersembunyi X menyerah. Dia melaporkan diri ke pos militer terdekat. Empat orang petugas menginterogasinya. Mereka bertanya tentang keterlibatan adik-adiknya dalam organisasi Aceh Merdeka. Dia menjawab tidak tahu. Selama proses interogasi tersebut dia disiksa, sebagaimana disampaikannya kepada Komisi berikut ini:

(tentara) memukul saya; saya diinjak-injak; di atas perut saya ditaruh papan kemudian empat orang tentara itu berjalan-jalan dan menginjak-injak di atas perut saya yang sudah ditaruh papan; beberapa saat perut saya dijadikan jembatan penyebrangan kemudian saya dibangunkan dengan disilang kedua ujung lengan saya; kemudian diberdirikan. Saya dibuat seperti bola voli. Lalu mereka memukul perut saya; menonjok pruncuen (bagian pinggang atas pantat) dengan ujung senjata sebanyak dua kali sampai daging saya sobek; kemudian ditusuk dengan sangkur senjata di dahi sampai mencururkan darah yang sangat (banyak).

Menurut saksi, semua siksaan itu dilakukan karena Kopassus di pos itu sudah mengetahui bahwa dia membantu GPK, dan ibunya hilang beberapa tahun lalu.

Perlakuan yang sama juga dialami oleh adik-adik saksi. Setelah lolos dari perburuan pada 1991, salah seorang adik saksi kembali ke kampung. Karena dianggap melarikan diri setahun yang lalu, kepulangan adik saksi itu disambut oleh perintah untuk

melaporkan diri ke Koramil Gelumpang Tiga. Dari Koramil adik saksi dibawa ke Pos Sattis Kembang Tanjong. Di sini dia mengalami penyiksaan, sebagaimana pernyataan saksi kepada Komisi:

Dia disuruh menyelam dalam tabung buangan WC; dipukul dengan broti; dipukul dengan bambu pagar; ditendang; ditonjok, dan diikat pada kursi, kemudian tentara menendangnya bersama kursi yang masih terikat di badan.”

Saksi mengatakan bahwa ihwal dia adalah keturunan GPK dan ibunya hilang beberapa tahun lalu, juga diketahui oleh pihak Kopassus yang datang belakangan. Karena alasan ini, pada 1995 dia kembali mengalami penyiksaan di depan umum pada saat gotong royong.

Mengendalikan anggota keluarga kelompok perlawanan untuk memastikan bahwa ancaman ideologi tersebut benar-benar lenyap menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun taktik operasi militer ini telah berkembang jauh. Keluarga dengan latar belakang pengaruh ideologi Aceh Merdeka yang kuat selama operasi ini berlangsung secara otomatis berada di bawah pengawasan Kopassus.

Kasus-kasus penghilangan paksa yang terjadi pada masa DOM terhadap seorang yang dituduh terlibat atau anggota Aceh Merdeka, selalu diikuti dengan serangan-serangan secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama terhadap anggota keluarga yang lain, berupa penahanan, penyanderaan, pengendalian ruang gerak, bahkan dalam beberapa kasus penghilangan paksa terhadap generasi di bawahnya. Keluarga dan lingkaran terdekat kelompok perlawanan dianggap sebagai sel hidup sehingga terus menerus diawasi dan diserang.

SEBAGAIMANA yang telah diurai di atas, berdasarkan kesaksian yang disampaikan oleh saksi mata kepada Komisi, semua korban penghilangan paksa lenyap pada saat menjadi tawanan pihak yang diduga anggota Kopassus di Pos Sattis. Dengan demikian Pos Sattis merupakan anasir yang menentukan dalam kasus-kasus penghilangan paksa selama pemberlakuan DOM di Aceh.

Kasus-kasus penangkapan tanpa prosedur, penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan, dan penghilangan paksa terhadap mereka yang didefinisikan sebagai musuh berlangsung secara terorganisir sejak 1990-1998 sekaligus menjelaskan kerangka

kerja operasi militer ini. Tidak ada prosedur yang membenarkan untuk semua jenis kejahatan melawan harkat dan martabat kemanusiaan tersebut, tapi perlu dikatakan itulah prosedur dan metodenya. Dengan demikian, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Pos Sattis sebagai salah satu sistem dalam operasi militer ini, dirancang dan dioperasikan berdasarkan tujuan yang jelas. Dengan kata lain direncanakan, terkoordinasi dengan baik, yang hanya mungkin bertahan sejauh disokong oleh sistem lain, yakni keberanian karena adanya impunitas.

Bagian III

KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI PADA MASA KONFLIK ACEH

Pemberlakuan Provinsi Aceh sebagai Daerah Operasi Militer dengan nama Operasi Jaring Merah pada tahun 1989. Status ini kemudian dicabut pada 7 Agustus 1998. Sebelum dilanjutkan dengan pemberlakuan Darurat Militer (2003-2004), terdapat sejumlah operasi-operasi kecil seperti Operasi Cinta Menasah, dan lain-lain. Hal ini menjadi penanda jelas konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Selain itu, juga mengakibatkan kepedihan dan kemiskinan yang berkepanjangan.

Ada banyak bentuk dan jenis kekerasan yang terjadi. Mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi hingga seksual. Beberapa organisasi HAM bahkan melaporkan bahwa ribuan warga sipil menjadi korban pembunuhan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan.³

Dirumah sederhana yang pernah tiga kali dibakar, seorang korban bercerita bahwa akibat konflik ia tak dapat bekerja dengan baik. Ia juga tidak mendapatkan bantuan apapun termasuk beras miskin (raskin). Dilain peristiwa, ada yang mengatakan bahwa anaknya meninggal setelah dilahirkan. Bayinya cacat dalam kandungan akibat kekerasan yang diterima. Yang lainnya mengaku hingga kini kepalanya kadang-kadang masih terasa sakit, lutut terasa nyeri. Ada pula perempuan yang dengan kemarahan mengatakan tidak mampu memaafkan sebab sampai hari ini payudaranya yang dipotong oleh militer masih terasa sakit.

Diluar imajinasi pikiran orang waras, kita mungkin sulit membayangkan ada siksaan berupa kemaluan perempuan yg dimasukkan botol dan pisang, atau payudara yang dipotong. Dipaksa berhubungan seksual dengan tahanan yang berlawanan jenis lalu ditonton. Dituduh memiliki tato ditubuh dan selangkangan lalu dipaksa telanjang untuk diperiksa. Dipaksa memakan bagian tubuh tertentu dari mayat. Ada anak yang

³ International Center for Transitional Justice (ICTJ), *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, Maret 2011, hlm. 2 dan 20.

diambil oleh tentara dengan alasan akan dipelihara, anak yang meninggal karena siksaan saat kehamilan, atau anak yang diperkosa. Termasuk mereka yang terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sebab suami yang meninggal, lari menyelamatkan diri atau bergabung dengan GAM.

Konflik di Aceh telah mengambil ongkos yang besar. Bukan cuma terkait keamanan tetapi juga kehancuran psikologis, tatanan sosial dan budaya, termasuk kepercayaan. Hal ini diketahui dari pertanyaan “ada diperkosa?” suami kepada istri yang diambil paksa oleh tentara.

Suara bergetar, intonasi yang tinggi atau malah datar, dan pandangan mata yang kosong, membawa pesan bahwa apa yang mereka alami sedemikian dahsyatnya. Tidak ada yang menafikan bahwa ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertanyaannya, mengapa negara bisa memperlakukan manusia sehewani itu?

Ada 22 kasus kekerasan seksual yang berhasil diwawancarai oleh pengambil pernyataan KKR Aceh. Lima korban diantaranya adalah laki-laki, sementara 12 korban lainnya perempuan. Menariknya adalah, kasus-kasus kekerasan seksual di daerah pantai timur seperti Pidie ditemukan sejak tahun 1990, belum sampai setahun sejak pemberlakuan pemberlakuan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer. Sementara wilayah Barat-Selatan seperti Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Selatan kasus-kasusnya berkisar tahun 2000-an.

Lalu apakah sebenarnya kekerasan seksual itu?

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan Kekerasan seksual sebagai *“setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.”*

Komnas Perempuan juga membagi kekerasan seksual dalam 15 bentuk, yakni: perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik

tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan yang terakhir kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Kekerasan seksual (KS) adalah sebuah kejahatan multi dimensi yang ditemukan di hampir seluruh aktivitas pelanggaran HAM. Ini dipakai sebagai alat untuk menciptakan teror dan ketakutan untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan GAM. Apapun jenisnya, KS adalah perbuatan merendahkan martabat dan penyangkalan terhadap kemanusiaan. Sebab merusak manusia pada hal paling personal dan paling subtil dalam hidup manusia.

Hampir disetiap wilayah yang terjadi pelanggaran HAM, baik di Indonesia mau pun di luar negeri, selalu ditemukan adanya kekerasan seksual terhadap perempuan. Seolah memperkosa perempuan-perempuan didaerah konflik menjadi doktrin militer. Persoalan lainnya adalah kekerasan terjadi tidak pernah tunggal. Perempuan tidak semata-mata hanya menerima kekerasan seksual, tetapi juga mendapatkan kekerasan fisik dan juga psikis. Bentuknya beragam, misalnya kekerasan seksual yang bercampur penyiksaan. Sehingga korban trauma berlapis seumur hidup bila tidak mendapat pemulihan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang “terus berlangsung”.

Tanpa penanganan yang tepat, korban terus hidup dengan menyimpan ingatan sebagai orang kotor dan terenggut. Ini adalah kejahatan luar biasa dan penanganannya tidak bisa biasa. Sebab pembuktiannya pun terbilang sulit sebab telah berlalu sekian lama.

Jika kita mengira bahwa pelecehan seksual hanya terjadi terhadap perempuan, itu merupakan kesalahan besar. Sebagaimana data yang dihimpun oleh Komisi, laki-laki juga mengalami pelecehan. Mulai dari ditelanjangi, hingga kemaluannya diolesi balsem.

Tanpa menafikan laki-laki korban pelecehan seksual, bagi perempuan, situasi menjadi sangat berbeda. Terdapat diskriminasi nilai, sebab dalam masyarakat nilai perempuan ditentukan oleh aspek seksualitas. Kehormatan keluarga ditentukan dari nilai perempuan didalam keluarga tersebut, dan ini merupakan martabat baik bagi ayah maupun suami.

Dalam hal ini militer melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan berbagai macam alasan untuk mendapatkan informasi keberadaan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bagian dari GAM/Inoeng Balee atau (diduga) membantu GAM. Bahkan dengan alasan yang tidak masuk akal sekalipun. Seperti, mengecek bekas pernah disentuh oleh GAM atau tidak. Dituduh menyimpan senjata didalam pakaian sampai mencari tato pertanda pasukan Inoeng Balee di badan dan selangkangan perempuan.

Yang terakhir tentu sangat sangat tidak masuk akal dan mengada-ada. Mengingat secara sosio-kultural orang Aceh umumnya beragama Islam, dan dalam agama Islam tato haram hukumnya. Pola mencari tato justru lazim kita dengar dalam cerita kekerasan seksual 1965. Dimana korban dipaksa mengiyakan setiap pertanyaan yang diajukan oleh militer, termasuk apakah ada tato di payudara atau kemaluan.

Pelecehan seksual sebagai sebuah kejahatan mestinya menghadirkan rasa malu pada pelaku. Namun yang terjadi justru rasa malu ada pada korban. Seperti tidak berani menceritakan dan sulitnya mendapatkan pengakuan langsung dari korban meskipun masyarakat sekitar telah menyampaikan bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual. Artinya sosio kultural membentuk pergeseran pemikiran. Tetapi mengapa bisa demikian?

Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex* menyebut “*one is not born, but rather becomes, a woman*”. Bahwa perempuan tidak dilahirkan tetapi dibentuk. Siapa yang membentuknya? Situasi perempuan didefinisikan oleh budaya dan masyarakat (dan bukan oleh dirinya sebagai subyek itu sendiri). Ada citra dan nilai tertentu dalam identitas perempuan yang menjadi konsensus tak tertulis bahwa perempuan seharusnya suci.

Meminjam teori Teresa de Lauretis, atribut sosial dilekatkan pada kelamin tertentu (gender) sebagai representasi yang terus menerus direproduksi melalui praktik institusi. Bisa berupa negara, tempat pendidikan, dan media. Dari sinilah kemudian apa yang disebut “laki-laki” dan “perempuan” serta perbedaan antara “maskulin” dan “feminin” secara konstan diproduksi dan direproduksi.

Sehingga tidak heran apabila pola pikir korban-pelaku yang awalnya tepat pada tempatnya kemudian bergeser. Karena ada upaya konstan untuk meluruskan

perempuan dan laki-laki. Mau tak mau pemikiran bahwa perempuan harusnya perawan dan suci terinternalisasi kedalam diri menjadi kesadaran baru.

Hal ini pula yang melahirkan stigma dan kekerasan lanjutan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Sehingga dapat dikatakan bahwa KS merupakan sebuah teror maha mengerikan. Hingga saat ini belum pernah ada upaya yang berhasil untuk mendorong adanya pertanggungjawaban Negara terhadap baik permintaan maaf dari Negara, ataupun upaya untuk memberikan reparasi bagi korban.

Bagian IV

CERITA DARI LAPANGAN

Sejak para komisionernya dilantik pada 24 Oktober 2016, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh memulai kerja-kerja pengungkapan kebenaran. Salah satunya melalui pengambilan pernyataan. Sejumlah orang direkrut untuk menjadi pengambil pernyataan (pp).

Ada sekitar 80 orang petugas pengambilan pernyataan yang bekerja di 14 Kabupaten/kota. Masing-masing dikepalai seorang Koordinator Wilayah. Para pengambil pernyataan umumnya berusia muda sebab rata-rata lahir diatas tahun 1990-an. Meski tak sedikit pula yang sempat masa remajanya dibawah desingan senjata.

Para petugas pengambil pernyataan telah mendapatkan sejumlah pelatihan. Mereka umumnya pernah mendengar, bahkan beberapa lainnya pernah merasakan, situasi konflik Aceh. Namun mereka tidak menyangka bahwa dampaknya begitu besar dan parah. Mereka juga mengaku terkejut saat mewawancarai korban secara langsung. Sebab yang ditemukan dalam bacaan dan pelatihan hanyalah bagian kecil dibandingkan saat berhadapan dengan korban dan penyintas.

Bermacam-macam perasaan bercampur didalam hati para petugas pengambil pernyataan saat mewawancarai korban dan penyintas.

Raseuki, salah seorang pengambil pernyataan mengaku saat konflik terjadi ia masih berusia sekitar 9 tahun sehingga belum memiliki kesadaran mengenai apa yang sedang terjadi. Meskipun telah mengikuti sekolah Hak Asasi Manusia dan berbagai pelatihan dari KKR Aceh, Raseuki tetap merasa nyeri didalam hatinya tiap kali bertemu korban.

“Mereka korban, hidupnya susah tetapi dalam keterbatasannya tetap memuliakan kita yang datang sebagai tamu dengan menyediakan minuman dan makanan kecil,” katanya.

Mendengar langsung cerita-cerita dari saksi hidup dan melihat keseharian dan kehidupan pribadi para pelaku sejarah memberi dampak berbeda. Raseuki dapat

merasakan betul efek kengerian siksaan saat pelanggaran HAM terjadi di Aceh. Ia merasa apa yang dipelajari dengan realitas lapangan jauh sekali. Dalam bacaan-bacaan dan kelas HAM, ia hanya mendengar tragedi-tragedi besar pelanggaran HAM berat.

Raseuki juga menjadi lebih mensyukuri nikmat hidup ditengah damai yang kini dirasakan. Raseuki tidak dapat membayangkan jika kehilangan yang dirasakan korban terjadi pada diri dan keluarganya.

“Hilang atau meninggal salah satu keluarga kita saja sudah rasanya sakit apalagi tanpa pengakuan Negara,” tutur Raseuki.

Hal itu pula yang membuatnya merasa memiliki hutang kepada korban. Meski pun Raseuki sadar ia tidak boleh menjanjikan apapun saat melakukan proses wawancara. Tiap kali korban menyampaikan harapan-harapannya, ia tetap merasa terbebani.

Raseuki hanyalah Raseuki, ia bukan representatif Negara, yang memiliki kuasa atas kewajibannya menangani persoalan pelanggaran HAM. Untuk itu semangat “hutang” yang membebani dirinya dijadikan motivasi untuk terus bekerja dalam isu pemenuhan Hak Asasi Manusia. Bagi Raseuki, pengakuan dan memorialisasi yang dibuat oleh Negara kepada korban pelanggaran HAM adalah mutlak. Harapannya ini akan jadi bukti sejarah agar kita tidak lupa.

Lain Raseuki, lain pula Yulia. Meski pun tidak pernah mengikuti Sekolah HAM, tetapi ia mengikuti *training* yang diselenggarakan KKR Aceh bagi para pengambil pernyataan.

Yulia telah lebih dari setahun mengambil pernyataan. Baginya kisah-kisah korban begitu menyentuh hatinya. Kekerasan dan penyiksaan yang diterima oleh korban seringkali tidak masuk akal baginya. Perasaannya selalu sakit tiap kali mendengar cerita korban, ia hampir tidak dapat membayangkan apa yang mereka alami.

Yulia juga sadar, dalam kondisi sesakit dan sesimpati apapun ia pada korban, dia tak boleh sampai menyuguhi janji-janji.

Yulia tak jarang menangis saat melakukan transkrip verbatim terhadap hasil rekaman wawancara. Suatu kali, ia pernah mendengar cerita korban yang dulu sempat ditahan

dalam kondisi hamil hingga anaknya lahir cacat. Yulia begitu tersentuh, hingga berinisiatif memberikan sebagian dari gajinya untuk korban tersebut.

Lain Yulia, lain pula dengan Evi. Evi justru merasa bahagia tiap kali bertemu korban dan penyintas yang akan diwawancarai. Selalu ada tantangan tersendiri tiap kali ke lapangan. Misalnya penolakan dari narasumber untuk diwawancarai. Atau korban yang kaku dan takut saat memberi pernyataan.

Dan tantangan itu menjadi energi baru yang membahagiakan saat ia berhasil melewatinya. Misalnya korban yang awalnya menolak, akhirnya mau diwawancarai. Atau adanya korban dan penyintas yang tertawa saat berbicara dengannya. Meski kebahagiaan itu cuma sebentar dan samar saja bagi mereka yang telah terlalu lama dalam rasa sakit. Bagi Evi, itu juga merupakan sebuah kepuasan tersendiri.

Sementara itu, Putri tumbuh remaja saat Aceh sedang berkonflik. Awalnya ia sempat berfikir bahwa apa yang pernah dialami saat masih kecil dulu sudah usai. Ingatan mengenai kekerasan yang sempat ia rasakan telah hilang seiring waktu.

Namun kemudian, setelah bertemu langsung dan mendengar cerita baik korban maupun penyintas, ingatan dan trauma masa silam hadir kembali. Ia sempat takut pada mobil REO tentara. Setelah mendengar cerita korban, Putri terkejut oleh pikirannya sendiri. Bayangan kekerasan yang pernah terlintas lagi, seperti film yang diputar kembali. Terasa sangat nyata.

Putri bercerita, diawal membaca narasi kesaksian korban ia bahkan sampai muntah, mengalami gangguan tidur, gelisah, mual hingga tidak selera makan. Setelah menemukan metode *release* dengan bercerita dan menonton, barulah ia merasa lebih baik.

Cerita kecil para pengambil pernyataan ini membentangi realitas bagaimana manusia-manusia Aceh akan membentuk peradaban baru. Bagaimana mereka jauh dari sejarahnya sendiri, lalu menantang diri untuk maju dalam penanganan korban pelanggaran HAM.

Setiap masa, setiap tempat memiliki perangnya masing-masing, dan semua perang memiliki pahlawannya sendiri. Bagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Aceh, cerita empat orang PP ini merupakan *pars de toto* yang mewakili cerita yang lebih besar. Rasanya tak berlebihan bila menyebut mereka adaalah pahlawan dalam cerita perjalanan KKR Aceh. Terima kasih untuk segala upaya dan kerja keras. Kiranya damai akan selalu terpelihara di Tanah Aceh.